

Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Pengaruhnya Terhadap Pergeseran Paradigma Diplomasi Dalam Studi Hubungan Internasional

Sri Issundari

Dosen Hubungan Internasional
UPN Veteran Yogyakarta

Abstract:

Science has been developed with the aims to obtain the truth that can be accepted and applied by society. The development of science is based on three dimintions i.e ontology, epistemology and axiology. Not only aimed to solve the problem of humanity, science can also be used to forecast and control phenomenon. In the context of International Relations study, the development of science can influence the research agenda and shift the basic assumptions that served as fundamental to develop the discipline. This article will try to describe how the development of science influence the shift of diplomacy paradigm in the study of IR

Keywords: *Diplomacy , Paradigm, Science Development*

Abstrak:

Ilmu pengetahuan berkembang dalam rangka memperoleh kebenaran yang bisa diterima serta diterapkan oleh masyarakat. Ilmu pengetahuan dikembangkan dengan berlandaskan tiga hal yaitu yaitu apa (ontologi), bagaimana (epistemologi) serta untuk apa (aksiologi). Tidak hanya memecahkan persoalan yang dihadapi manusia, ilmu pengetahuan juga diharapkan dapat meramalkan serta mengontrol fenomena. Dalam konteks ilmu Hubungan Internasional, pengembangan ilmu pengetahuan dapat mempengaruhi agenda penelitian dengan menggeser asumsi-asumsi dasar yang menjadi landasan perkembangan kajian tersebut. Tulisan ini akan mencoba untuk menjelaskan bagaimana perkembangan ilmu pengetahuan mempengaruhi pergeseran paradigma diplomasi dalam studi HI.

Kata Kunci : *Diplomasim Paradigma, Pengembangan Ilmu Pengetahuan*

Menurut AF Calmer, yang dimaksud dengan ilmu pengetahuan adalah kegiatan intelektual yang meliputi: mengamati, memilah-milah atau membedakan, memilih, melakukan percobaan dan mengembangkan (AF Calmer). Ilmu pengetahuan dalam hal ini berawal dari kegiatan manusia mengamati berbagai macam gejala alam berupa persoalan yang dihadapi kemudian memilih-milih, membedakan sekaligus memilah-milah indicator-indikator yang dibutuhkan untuk penyelesaian masalah. Setelah memiliki data yang cukup kemudian melakukan percobaan serta mengembangkan

temuannya dalam konteks ilmu pengetahuan. Kemampuan manusia untuk mengembangkan ilmu pengetahuan disebabkan karena dua hal: pertama, manusia memiliki bahasa yang mampu mengkomunikasikan informasi dan jalan pikiran yang melatarbelakangi informasi tersebut serta kedua, manusia mempunyai kemampuan berpikir menurut suatu alur kerangka berpikir tertentu (Jujun S Suriatmaja, 1994: 40). Hal inilah yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya karena manusia memiliki nalar yang menuntun cara berpikir manusia secara sistematis.

Perubahan-perubahan yang terjadi pada alam pada dasarnya juga akan selalu menjadi perhatian bagi ilmu pengetahuan. Tidaklah mengherankan jika ilmu pengetahuan akan selalu berproses. Di dalam filsafat ilmu, pengetahuan berkembang melalui sebuah proses yang disebut dengan perkembangan pengetahuan. Thomas Kuhn dalam bukunya yang berjudul *The Structure of Scientific Revolution* menjelaskan dalam istilah yang disebut pergeseran paradigma. Paradigma merupakan suatu cara pandang, nilai-nilai, metode-metode, prinsip dasar atau memecahkan sesuatu masalah yang dianut oleh suatu masyarakat ilmiah pada suatu tertentu (Thomas Kuhn, 1962). Dalam ranah filsafat secara khusus paradigma diartikan sebagai kerangka filosofis dan teoritis dalam disiplin atau aliran sains di mana teori-teori, hukum, serta generalisasi dan uji coba yang dilakukan dalam mendukungnya telah dirumuskan, baik yang mencakup segala kerangka filosofis maupun teoritis.

Pengembangan ilmu pengetahuan akan terjadi jika paradigma yang lama mengalami krisis dan akhirnya orang mengembangkan paradigma yang baru yang sekiranya lebih rasional dan logis. Pengembangan ilmu pengetahuan pada dasarnya bertujuan untuk mencapai kesempurnaan teori. Menurut Thomas Kuhn, ilmu dapat berkembang maju dalam pengertian tertentu, jika ia tidak dapat mencapai kesempurnaan absolut dalam konotasi dapat dirumuskan dengan definisi teori. Oleh karena itu ia memandang bahwa ilmu itu berkembang secara open-ended atau sifatnya selalu terbuka untuk direduksi dan dikembangkan (Kuhn, 1962).

Menurut Karl R Popper, pergeseran paradigma atau munculnya teori baru berawal dari adanya falsifikasi (Karl R. Popper, 1959) sedangkan Kuhn menyebutnya dengan anomaly (Kuhn, 1962). Ada beberapa hal yang menyebabkan ilmu pengetahuan mengalami fals yaitu: pertama, teori dibuat dalam suatu keadaan masa lampau yang sudah tidak lagi sesuai kedua, kedua, teori dibangun lingkungan kehidupan masyarakat yang berbeda dengan lapangan, serta ketiga, keterbatasan hasil pengamatan dalam membangun teori (Karl R. Popper, 1959).

Dalam pandangan Kuhn ilmu pengetahuan adalah sebagai sebuah kegiatan menyelesaikan puzzle. Fungsi paradigma adalah seperti menyediakan puzzle bagi para ilmuwan sekaligus menyediakan alat untuk solusinya. Ia pertama kali menggunakannya dalam sains, dengan menunjukkan bahwa penelitian ilmiah belum tentu menuju kepada kebenaran. Selanjutnya Kuhn menjelaskan bahwa ilmu pengetahuan berjalan dalam tiga fase (Thomas Kuhn, 1962).

1. Tahap pra-ilmiah dan pra-paradigm

Fase ini umumnya ditandai oleh beberapa teori yang tidak sesuai dan tidak lengkap hingga akhirnya salah satu dari teori ini “menang.” Hal semacam ini berlangsung selama kurun waktu tertentu sampai suatu paradigma tunggal diterima oleh semua, sehingga jalan menuju normal science mulai ditemukan.

2. Tahap Sains normal

Dalam fase ini seorang ilmuwan mengumpulkan banyak teori layaknya kepingan puzzle. Dalam sains normal, tugas ilmuwan memperluas dan lebih membenarkan paradigma. Dalam wilayah ini bisa saja terdapat banyak persoalan yang tidak terselesaikan dan kejanggalan, Kuhn menyebut keadaan ini sebagai anomali. Jika anomali-anomali yang ada terakumulasi dan menjadi akut, maka akan menimbulkan krisis dan meicu timbulnya paradigma baru, inilah yang oleh Kuhn disebut sebagai “revolusi sains.”

3. Tahap Pergeseran paradigma

Pada periode revolusioner ini suatu komunitas ilmiah menyusun diri kembali di sekeliling suatu paradigma baru, memilih nilai-nilai, norma-norma, asumsi-asumsi, bahasa-bahasa, dan cara-cara mengamati serta memahami alam ilmiahnya dengan cara yang baru. Inilah proses pergeseran paradigma (shifting paradigm), yakni proses dari keadaan sains normal menuju sains revolusi. Cara pemahaman dan pemecahan persoalan model lama ditinggalkan dan berganti dengan yang baru. Periode ini terjadi melalui pergeseran paradigma ini berkali-kali yang disebut Ekstra Ordinary Science (Sains Luar Biasa), seperti teori-teori baru menggantikan yang lama.

Senada dengan tahapan fase paradigm Kuhn, Karl Marx mengenalkan istilah dialektika materialism yang diambil dari pendapat Friederich Hegel. Dalam dialektika materialism ini, dialektika merupakan proses antagonism tesis versus anti-tesis yang melahirkan sintesis. Dari sintesis ini akan timbul tesis dan anti tesis yang baru (Max Weber, 1973). Antithesis baru ini yang merupakan implementasi dari pergeseran paradigma ataupun terbentuknya teori baru sekaligus sebagai jawaban atas adanya falsifikasi dalam merespon gejala alam.

Pengembangan Ilmu Pengetahuan dalam konteks diplomasi

Salah satu implementasi pengembangan ilmu pengetahuan adalah dalam konsep diplomasi. Jika dikaitkan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, maka metode dan isu dalam diplomasi mengalami pergeseran makna yang disesuaikan dengan persoalan-persoalan social. Diplomasi dalam hal ini mengalami perkembangan setelah terjadi anomaly social yang diikuti dengan pergeseran paradigm. Jika dikaitkan dengan tahapan perkembangan ilmu pengetahuan menurut konsepsi Kuhn maka tahapan yang dilalui diplomasi bisa dirunut dari masa pre-sains yang diawali pada masa Romawi kuno dan pertengahan. Berikut ini akan dibahas tahapan perkembangan diplomasi.

1) Tahapan pra-ilmiah dan pra-paradigma

Tahapan ini diawali pada praktek diplomasi digunakan dalam aktifitas yang sangat sederhana yaitu saat manusia memulai kehidupan kelompok, saling berhubungan, termasuk melakukan negosiasi untuk mencapai berbagai tujuan mereka. Dalam literatur kuno sering digambarkan bahwa malaikat/ dewa yang membawa wahyu antara surga dan bumi merupakan diplomat pertama.

Di berbagai wilayah, praktek diplomasi berlangsung dalam bentuk yang bervariasi. Di India Kuno kegiatan diplomatik ditemukan dalam berbagai tipe utusan seperti duta, prahita, palgala, suta dan sebagainya. Duta adalah ahli dalam hal pengumpulan informasi mengenai kekuatan musuh, prahita merupakan utusan yang dikirim oleh rajanya. Palgala dan Suta merupakan pejabat-pejabat tinggi yang memiliki pengaruh dalam pemilihan raja, mereka juga ditugaskan untuk membawa misi-misi diplomatik penting ke negara-negara lain. Palgala terutama berfungsi sebagai pembawa pesan politik ke negara-negara tetangga. Suta menjalankan sejumlah tugas seperti charioteer, penyebarluasan informasi dan lain-lain. Dimana dibawah suta-lah institusionalisasi diplomasi terwujud dalam sebuah departemen diplomasi dalam kerajaan kuno di India.

Di Yunani Kuno praktek diplomasi berlangsung sejak abad ke-6 S.M. dimana para warga kota Yunani memilih utusan-utusan mereka untuk berunding. Mereka diharapkan melakukan perundingan atau negosiasi secara lisan dan dimuka umum. Pada masa ini juga diwarnai dengan pengiriman dan penerimaan kedutaan-kedutaan menjadi semakin sering antara negara-negara kota Yunani. Sementara itu, perkembangan di Romawi Kuno tradisi diplomasi ditandai dengan seringnya mereka memaksakan kehendaknya daripada melakukan perundingan atas dasar timbal balik. Mereka menyerbu lawannya yang keras kepala dan hanya mengecualikan mereka yang mau tunduk pada kehendak Romawi; Dalam pertumbuhan dan perkembangan hukum internasional, mereka menciptakan beberapa ungkapan seperti: *ius civile* (hukum yang diterapkan pada warganegara Romawi); *ius gentium* (hukum

yang diterapkan pada warganegara Romawi dengan orang asing); dan *ius naturale* (hukum yang umum bagi seluruh umat manusia) (Barston, 2006).

Dalam abad 17 ini pengiriman atau penempatan misi permanen merupakan praktek yang umum diantara negara-negara, dan diplomasi telah menjadi suatu profesi dan mendapat pengakuan umum sebagai metode hubungan internasional. Tumbuhnya nasionalisme dan sistem negara bangsa (*nation state system*) menyebabkan alat perlengkapan (*dinas*) negara ini sebagai suatu hal yang *essensial* (yang pokok, penting) khususnya setelah perdamaian Westphalia tahun 1648 sebagai titik kristalisasi dan peresmian tegas dari sistem negara. Pada abad ke 17 ini terdapat beberapa faktor yang kemudian mendukung dan mendorong pelaksanaan praktek-praktek diplomatik. Harold Nicholson menggambarkan bahwa pada abad ini kemajuan teori diplomasi yang telah diperoleh berangkat dari konsepsi sempit hak-hak kesukuan yang eksklusif menuju konsepsi yang lebih luas tentang kepentingan umum yang inklusif (Barston, 2006). Ada hal penting yang menjadi ciri khas diplomasi pada tahapan pra-ilmiah ini yaitu diplomasi belum terlembaga dengan baik atau berjalan secara sporadis sedangkan aktor negara menjadi pusat dalam implementasi birokrasi serta isu yang dibahas adalah mengenai kedaulatan dan pertahanan.

b. Tahap Normal Sains

Revolusi ilmu pengetahuan mengenai perkembangan diplomasi terjadi pada abad 19 yang ditandai dengan mulai adanya kesepakatan diantara para akademi, ilmuwan serta politisi akan metode-metode (*cara-cara*) baru maupun persoalan baru yang ditetapkan atau ditentukan dalam persetujuan-persetujuan internasional dan telah berkembang menjadi suatu kode etik yang umumnya dipatuhi oleh negara-negara.

Dengan munculnya PBB pada abad ke 20 ini diplomasi multilateral yang dilakukan didalam wadah ini menjadi trend baru yang menjadi alternatif selain diplomasi bilateral yang dahulu paling sering dilakukan, dimana diplomasi dalam kerangka/ wadah organisasi seperti PBB disebut dengan diplomasi konferensi (Sumaryo Suryokusumo, 2004: 62). Karena sifatnya konferensi maka, pada masa ini diplomasi dapat dikatakan lebih terbuka. Diplomasi Masa Perang Dingin. Banyak karakteristik dari diplomasi model baru yang kemudian berkembang pasca perang dunia II, termasuk berkembangnya multilateralisme dan peningkatan agenda khusus yang memperhatikan permasalahan lingkungan, teknologi dan proliferasi senjata. Selain itu dekolonisasi yang terjadi memunculkan negara-negara baru yang pada kenyataannya mereka belum terbiasa dengan aturan dan prinsip diplomasi yang ada yang membawa mereka memperjuangkan status mereka melalui hukum internasional. Penyebutan istilah “Diplomasi Perang Dingin” merujuk kepada beberapa

aspek khusus dalam diplomasi yang muncul pasca berakhirnya perang dunia II. Kondisi ini menempatkan pemimpin negara sebagai pelaku utama dalam berdiplomasi. Karena terkait dengan upaya penyelesaian konflik yang melibatkan negara.

Beberapa tipe diplomasi pada masa perang dingin : Diplomasi Nuklir : diplomasi nuklir merujuk kepada bagaimana interaksi diantara negara-negara pemilik senjata nuklir (khususnya AS dan US) dimana seringkali diantara mereka menggunakan senjata nuklirnya untuk menggunakan senjata nuklir dalam mengintimidasi lawan yang akan melakukan suatu tindakan atau membujuk lawan untuk berhenti melakukan suatu tindakan. Kondisi ini kemudian dikenal dengan istilah *deterrence* dan kemudian menjadi *compellence*. *Summit Diplomacy*: merujuk kepada pertemuan langsung diantara kepala negara/ pemerintahan (khususnya negara-negara superpower; AS dan US) untuk menyelesaikan permasalahan yang cukup sensitif. Dimana pertemuan semacam ini menjadi salah satu tren pada masa perang dingin. Diplomasi Pasca Perang Dingin.

Berakhirnya Perang Dingin membawa perubahan dalam konteks internasional dimana diplomasi dijalankan. Dimana berakhirnya perang dingin, dengan runtuhnya Uni Soviet memunculkan ekspektasi tinggi mengenai bagaimana sesuatu dapat dicapai dengan diplomasi dan negosiasi. Kesuksesan memukul mundur Irak dari Kuwait melalui kekuatan bersenjata dibawah mandat resolusi PBB menjadi salah satu contoh diplomasi yang akan menjadi model dimasa yang akan datang. Tetapi kemudian pada masa ini muncul permasalahan baru terkait dengan gagalnya diplomasi dalam menyelesaikan permasalahan pecahnya Yugoslavia yang kemudian memicu krisis di Balkan. Berdasarkan penjelasan di atas, ada beberapa hal penting yang mewarnai perkembangan paradigma diplomasi pada fase kedua ini yaitu pelembagaan diplomasi dalam bentuk aturan main bersama yang diatur melalui hukum internasional. Meskipun demikian, pelaku diplomasi masih difokuskan pada negara serta isu yang dibahas dalam diplomasi adalah isu-isu pertahanan dan kedaulatan negara.

c. Tahap Pergeseran Paradigma

Pergeseran paradigma diplomasi terjadi pada abad 21 diawali dengan beberapa anomaly yang tidak dapat dipecahkan oleh diplomasi lama yaitu ancaman perang yang tidak kunjung berhenti serta masalah-masalah social seperti kemiskinan dan pembangunan yang muncul dan membutuhkan perhatian lebih serius. Awal masa ini, diplomasi pada level internasional memiliki dua karakteristik. Pertama adalah diplomasi diawali pada tataran global. Berakhirnya Perang Dingin membuat negara-negara keluar dari praktek diplomasi yang dijalankan selama perang dingin berlangsung. Kondisi

diplomasi yang pada awalnya selalu terfokus kepada Barat dan Timur berubah menjadi Utara dan Selatan tentu dengan melibatkan isu yang low politics dengan cakupan global seperti kemiskinan dan pembangunan dalam aktivitas diplomasinya. Kedua, diplomasi memiliki karakteristik yang kompleks dan terpisah-pisah/terfragmentasi. Karakteristik dapat dilihat bahwa munculnya banyak aktor membuat multilateralisme semakin kompleks seperti halnya proses bilateral dan substansi dari diplomasi global mencakup isu yang lebih luas dari yang pernah ada sebelumnya. Dalam diplomasi pasca perang dingin, dikenal developmental diplomacy. Developmental diplomacy merujuk kepada proses dimana negara dunia ketiga berusaha untuk melakukan negosiasi dalam rangka meningkatkan posisi mereka dalam ekonomi politik internasional. Negosiasi ini sebagian besar merupakan upaya menaikkan posisi tawar negara dunia ketiga terhadap negara industri maju (negara Barat).

Diplomasi di Pasca 9/11 Penyerangan terhadap Gedung WTC di New York dan Pentagon di Washington, AS pada 11 September 2001 kembali membawa perubahan dalam konstelasi politik internasional. Perubahan ini kembali membawa diplomasi untuk menyesuaikan diri dengan kondisi. Diawali dengan inisiatif AS melakukan berbagai upaya diplomasi untuk meraih simpati dari negara-negara di dunia untuk bersama-sama melakukan kampanye “war against terror” dengan mengedepankan “soft diplomacy” sebagai instrumen power, maka bentuk diplomasipun semakin berubah seperti diplomasi public yang menedepankan pendekatan-pendekatan yang bersifat persuasi dalam bentuk kegiatan yang sifatnya social budaya serta diplomasi preventif yang mengedepankan kerjasama untuk mencegah potensi konflik. Dapat disimpulkan bahwa pergeseran diplomasi pada tahap ketiga ini mewarnai perubahan penting paradigm diplomasi berupa pelaku diplomasi yang mulai menyebar yang tidak lagi tersentral pada actor-aktor negara saja melainkan melibatkan actor-aktor non negara serta isu diplomasi yang diangkat mulai menyentuh masalah kemiskinan dan pembangunan.

Daftar Pustaka:

- Suriasumantri, Jujun S, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994.
- Kuhn, Thomas S, (terj) *The Structure of Scientific Revolutions*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 1962.
- Popper, Karl R, *The Logic Scientific Discovery*, New York: Basic Book, 1959.
- Marx Weber, *The Role of Ideas in History* dalam Emitai Etzioni, *Social Change, Sources, and Patterns and Consequence*, New York: Basic Book, Inc Publisher, 1973.
- Suryokusumo, Sumaryo, *Praktik Diplomasi*, STIH IBLAM, Jakarta, 2004.
- Barston, *Modern Diplomacy*, Routledge Taylor & Francis Group, 2013.